

NILAI STRATEGIS ALIANSI INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DALAM PENGAMANAN BLOK LAUT AMBALAT

STRATEGIC VALUE OF ALLIANCE BETWEEN INDONESIA AND THE UNITED STATES OF AMERICA IN DEFENDING AMBALAT SEA BLOCK

Yanyan M. Yani¹ dan Ian Montratama²

Dosen Universitas Padjadjaran dan *Institute for Defense and Strategic Research*
Kampus Pascasarjana Fisip Unpad, Jl. Bukit Dago Utara No. 25, Bandung -
Gedung Bank Panin Pusat Lt. 3, Jl. Sudirman Kav. 1, Jakarta
E-mail: yan2m@hotmail.com, montratama@gmail.com

Diterima: 3 Agustus 2015; direvisi: 15 September 2015; disetujui: 2 Desember 2015

Abstract

In globalization era, great powers pose more intense and wider influence toward other lesser states in the globe. Theoretically, Walt argues that medium and lesser states tend to align toward greater powers to have protection against threat. However, in practice, Indonesia keeps standing to become a neutral state that does not ally to any power blocks. This paper will examine the benefit for Indonesia to ally with the United States OF America in a case of securing the trouble water in Ambalat Sea Bloc.

Keywords: globalization, great power, medium state, quasi-alliance, Ambalat Sea Bloc.

Abstrak

Dalam era globalisasi, kekuatan besar semakin memiliki pengaruh yang lebih intens dan luas ke negara-negara lain yang lebih lemah di dunia. Secara teoritis, Walt berpendapat bahwa negara-negara sedang dan lemah terpaksa mendekati negara yang lebih kuat untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman. Namun dalam prakteknya, Indonesia tetap teguh untuk menjadi negara netral yang tidak beraliansi ke pihak manapun. Paper ini akan mengkaji manfaat bagi Indonesia untuk beraliansi dengan Amerika Serikat dalam kasus pengamanan perairan bermasalah di Blok Laut Ambalat.

Kata Kunci: globalisasi, kekuatan besar, negara sedang, kuasi-aliansi, Blok Laut Ambalat.

¹ Prof. Drs. Yanyan M. Yani, MAIR, Ph.D adalah Guru Besar di Universitas Padjadjaran dengan kepakaran bidang *defense and security studies* dan *foreign policy analysis*, dimana saat ini juga menjabat sebagai Kepala Prodi Pascasarjana HI Universitas Padjadjaran.

² Ian Montratama, S.E., M.E.B., M.Si. (Han) adalah mahasiswa program doktoral HI Universitas Padjadjaran tahun 2014 yang aktif sebagai peneliti di IDSR dengan fokus kajian di bidang foederologi dan komparasi alutsista.

Pendahuluan

Dalam penelitian Saputra di Unila,³ tercatat jumlah pelanggaran wilayah di Blok Laut Ambalat (BLA) oleh aparat Kerajaan Malaysia sebagai berikut: di tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran, di tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran, di tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran, di tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran, di tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran, di tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran, di tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran, dan tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran. Jika merujuk pada Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008,⁴ tindakan pelanggaran seperti itu dapat dianggap sebagai ancaman militer. Ancaman militer yang dimaksudkan adalah ancaman dari kekuatan bersenjata dan terorganisir yang mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Maka tidaklah mengherankan jika dari bidang pertahanan, Mabes TNI telah membentuk Satuan Tugas Pengamanan Ambalat TNI yang dipimpin oleh Panglima Armada Timur TNI AL sejak tahun 2014.

Bagi kaum realis, pelanggaran wilayah yang dilakukan aparat Malaysia di Blok Laut Ambalat (BLA) itu juga suatu masalah yang sangat serius. Kaum realis ofensif⁵ dengan tokohnya John Mearsheimer berpendapat bahwa dua negara dapat terlibat dalam perang, walau keduanya hanya ingin bertahan hidup (*survive*) – dan bukan karena alasan ekspansif atau agresif. Dalam konteks Ambalat, akses dan kendali atas sumber minyak di bawah dasar laut BLA bagi Indonesia dan Malaysia dapat merupakan suatu bentuk pertahanan hidup untuk mengatasi krisis energi domestik. Cadangan minyak kedua negara semakin menipis. Keduanya sudah menjadi negara importir minyak. Potensi minyak di BLA akan dapat memenuhi kebutuhan masing-masing negara untuk energi minyak selama minimal 30

³ Muhammad Aden Saputra, *Sengketa Batas Wilayah Indonesia-Malaysia di Perairan Ambalat*, Skripsi, (Bandar Lampung: Fisip Universitas Lampung, 2014), hlm. 80.

⁴ “Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008”, <http://www.kemhan.go.id/kemhan/files/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e3.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juni 2015, hlm. 28.

⁵ R. Harrison Wagner, *War and the State: the Theory of International Politics*, (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2010), hlm. 13.

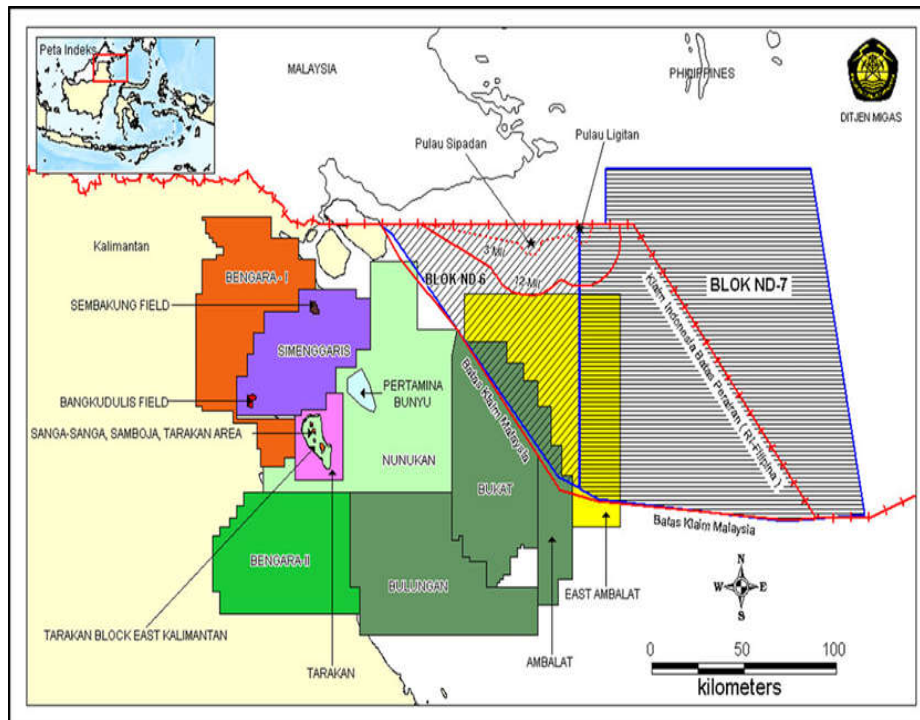
tahun ke depan.⁶ Namun, penyelesaian sengketa dengan cara damai akan semakin menantang. Kedua negara telah memberikan konsesi penambangan minyak ke pihak asing. Indonesia telah memberikan konsesi pada ENI, Unocal dan Pertamina. Sedangkan Malaysia memberikan kepada Shell dan Petronas.

Sejarah telah mencatat beberapa perang modern yang diakibatkan perebutan kendali dan/atau akses ke sumber minyak. Walaupun lembaga internasional seperti PBB dan komunitas keamanan dalam *ASEAN Political and Security Community* (APSC) dijadwalkan berjalan pada akhir tahun 2015, namun tidak ada jaminan jika sengketa Ambalat dapat diselesaikan dengan cara damai. Jika kita menggunakan adagium kaum realis *ci vis pacem parbellum*, maka untuk kita menginginkan penyelesaian sengketa Ambalat dengan cara damai, kita harus menyiapkan diri dalam menyelesaikan sengketa Ambalat dengan cara kekerasan (*violence*).

Kekuatan militer Indonesia yang besar tentunya akan membuat upaya penyelesaian dengan cara diplomasi akan semakin efektif. Jika militer Indonesia lebih kuat, Malaysia tentu akan menghendaki perundingan sengketa selalu difokuskan dengan cara damai. Opsi melalui kekerasan (baca: perang) tidak akan menarik bagi Malaysia. Namun sebaliknya, jika kekuatan militer Indonesia lemah, maka penyelesaian dengan cara kekerasan akan tetap selalu menjadi pertimbangan (yang mungkin memiliki probabilitas yang relatif besar bagi) Malaysia.

Ketegangan-ketegangan yang muncul di perairan BLA antara aparat Indonesia dan Malaysia dapat muncul karena adanya perbedaan-perbedaan persepsi. Kedua pihak merasa sedang melakukan pengamanan atas perairan ZEE-nya. Eskalasi dari ketegangan menjadi konflik pun bisa kapan saja terjadi. Paper ini akan mengkaji perspektif teori realis dengan perspektif praktis atas kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi sengketa Ambalat dengan memanfaatkan jalinan hubungan erat dengan

⁶ Anggi Kusumadewi, “Sejarah Panjang Kemelut RI-Malaysia di Ambalat”, CNN Indonesia, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-ri-malaysia-di-ambalat/>, 17 Juli 2015, diakses pada tanggal 25 September 2015.



Sumber: Muhammad Aden Saputra, *Sengketa Batas Wilayah Indonesia-Malaysia di Perairan Ambalat*, Skripsi, (Lampung: Universitas Lampung, 2014), hlm. 67.

Gambar 1. Peta Blok Laut Ambalat

Amerika Serikat (yang hingga saat ini masih menjadi satu-satunya negara superpower setelah berakhirnya perang dingin di tahun 1991).

Sengketa Ambalat dan FPDA

Menurut Saputra,⁷ masalah sengketa perbatasan di Ambalat ditengarai oleh perebutan daerah cadangan minyak di Blok Ambalat dan Ambalat Timur (menurut penamaan versi Indonesia) atau Blok XYZ (versi Malaysia). Pada tanggal 16 Februari 2005, Petronas (perusahaan minyak Malaysia) memberikan konsesi atas Blok ND-6 dan ND-7 kepada Petronas Carigali yang bermitra dengan Royal Dutch/Shell Group. Blok yang menjadi subjek konsesi Malaysia ini tumpang tindih dengan Blok Ambalat dan Ambalat Timur yang dikonsesikan oleh Indonesia kepada ENI (perusahaan minyak Italia) dan Unocal (perusahaan multinasional Amerika) pada tanggal 12 Desember 2004. Tumpang tindih

⁷ Muhammad Aden Saputra, *Sengketa Batas Wilayah Indonesia-Malaysia di Perairan Ambalat*, Skripsi, (Lampung: Universitas Lampung, 2014), hlm. 4

klaim ZEE (*overlapping claim areas*) tersebut yang menjadi pemicu sengketa di Blok Ambalat.

Klaim Indonesia atas BLA didasarkan pada: (1) konvensi antara Kerajaan Britania dan Kerajaan Belanda di tahun 1891; dan (2) kesepakatan *United Nations Convention on the Law of the Seas* (UNCLOS) pada tahun 1982, dimana Blok Ambalat secara resmi masuk ke dalam wilayah teritori dan kedaulatan Indonesia. Pasal 4 UNCLOS mengakui bahwa wilayah teritori mencakup 200 mil dari garis batas, di mana Blok Ambalat sepenuhnya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kemudian pada pasal 13 UNCLOS⁸ menetapkan Indonesia berhak menarik garis batas laut dari Karang Unarang dan Indonesia memiliki kedaulatan atas Blok Laut Ambalat karena berada di ZEE Indonesia (dari penarikan garis batas dari Karang Unarang).⁹

⁸ Bunyi pasal ini: "...area of land which is surrounded by and above water at low tide but submerged at high tide. Where a low-tide elevation is situated wholly or partially at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the mainland or an island, the low-water line on that elevation may be used as the baseline for measuring the breadth of the territorial sea."

⁹ Indro Dwi Haryono, 2007, *Perspektif Malaysia tentang*

Sementara menurut Hasjim Djalal,¹⁰ Malaysia menuntut batas laut Indonesia-Malaysia dihitung dari garis tengah antara pulau Sipadan dan pulau Ligitan dengan pulau-pulau Indonesia di Kalimantan Timur. Klaim Malaysia atas BLA didasarkan pada dua alasan, yaitu: (1) pada peta wilayah kedaulatan Malaysia yang dilansir pada tahun 1979; dan (2) pada hasil keputusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang memenangkan Malaysia atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di tahun 2002.

Blok Laut Ambalat (BLA) menjadi daerah yang bernilai strategis karena memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang sangat melimpah.¹¹ Dari sumber CNN Indonesia disebutkan bahwa ada satu titik tambang di Ambalat yang menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Itu baru sebagian kecil, sebab Ambalat memiliki titik tambang tak kurang dari sembilan. Kandungan minyak dan gas di sana disebut dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun – suatu keuntungan besar bagi negara manapun yang menguasai Ambalat.¹² Indonesia dan Malaysia tentu memiliki kepentingan yang besar atas penguasaan BLA (karena keduanya sedang mengalami krisis energi minyak).¹³

Dengan ditemukannya kekayaan alam di bawah BLA, perundingan masalah sengketa

perbatasan menjadi lebih alot.¹⁴ Situasi ketegangan di Ambalat pun sudah sering kali memanas. Berulangkali kapal perang dan pesawat Malaysia melakukan sejumlah pelanggaran wilayah dari tahun 2002 hingga saat ini. Perilaku aparat Malaysia dinilai arogan dan provokatif oleh aparat Indonesia. Kesan umum yang berkembang di Indonesia adalah perilaku Malaysia telah menginjak wibawa Indonesia dan hal tersebut memancing sentimen keras dari berbagai kalangan di Indonesia.¹⁵

Perilaku provokatif yang diinisiasi negara inferior (baca: Malaysia) ke negara lain yang superior (baca: Indonesia) terkesan tidak logis. Tidak mungkin negara inferior akan menang perang jika sengketa yang diprovokasi berubah menjadi konflik bersenjata. Tentu ada faktor eksternal (seperti aliansi) yang diharapkan akan membantu Malaysia jika Malaysia terlibat konflik dengan Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Benson (et al.)¹⁶ menyimpulkan bahwa negara anggota aliansi cenderung berperilaku membahayakan (*moral hazard*). Hal tersebut dikarenakan ekspektasi bantuan eksternal dari negara anggota aliansi lainnya yang relatif tinggi. Ekspektasi bantuan eksternal ini menumbuhkan persepsi bahwa akumulasi kekuatan negara-negara aliansi lebih kuat dari negara ancaman. Persepsi kekuatan relatif yang superior ini dapat memicu perilaku agresif dan/atau provokatif dalam menghadapi situasi sengketa. Negara aliansi tersebut berasumsi, manakala situasi sengketa tereskalasi menjadi konflik bersenjata, kemenangan pasti berada di pihak kekuatan aliansi. Pendapat Benson ini dapat menjadi salah satu teori dalam menjelaskan perilaku agresif Malaysia di Blok Laut Ambalat.

Sengketa Ambalat, <https://indronet.files.wordpress.com/2007/09/ambalat.pdf>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015.

¹⁰ Hasjim Djalal, "Perundingan Blok Ambalat Akan Berjalan Alot", *Tabloid Diplomasi*, <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/43-desember-2008/249-perundingan-blok-ambalat-akan-berjalan-alot.html>, Desember 2008, diakses pada tanggal 25 September 2015

¹¹ Menurut Indro Dwi Haryono, 2007, "Perspektif Malaysia tentang Sengketa Ambalat", <https://indronet.files.wordpress.com/2007/09/ambalat.pdf>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015, hlm.1, kandungan minyak bumi di BLA senilai Rp. 4.200 triliun.

¹² Kusumadewi, *op.cit.*

¹³ Menurut Index Mundi, yaitu suatu portal internet yang memberikan layanan informasi statistik ekonomi dunia yang di-update secara berkala, <http://www.indexmundi.com/>, pada tahun 2011 selisih produksi dan konsumsi minyak Indonesia adalah -201.080 barel/hari, sedangkan Malaysia sebesar -33.280 barel/hari diunduh pada 25 September 2015

¹⁴ Hasjim Djalal berpendapat, jika tidak diketemukan kekayaan alam di BLA, perundingan sengketa perbatasan akan lebih cepat dituntaskan. Namun di Blok Ambalat telah diketahui bahwa di wilayah itu terdapat cukup banyak kekayaan alam, terutama migas. Hal ini tentu akan membuat situasi menjadi lebih rumit.

¹⁵ Muhammad Aden Saputra, *op.cit.*

¹⁶ B.V. Benson, P.R. Bentley, J.L. Ray, "Ally Provocateur: Why Allies Do Not Always Behave", *Journal of Peace Research*, Januari 2013, Vol. 50, No.1, hlm. 47-58.



Sumber: <https://panjicero.files.wordpress.com/2011/12/tu16-badger-russia.jpg>; dan <http://beritapopulis.files.wordpress.com/2008/12/kri-irian-2.jpg>.

Gambar 2. KRI Irian dan Pembom Strategis Tu-16KS Badger dengan Rudal AS-1 Kennel

Malaysia adalah anggota aliansi dalam *Five Powers Defense Arrangement (FPDA)*¹⁷ sejak tahun 1971. FPDA dibentuk terkait situasi politik di tahun 1960-an dimana antara Indonesia dan Malaysia pernah terlibat konflik (yang dikenal dengan Konfrontasi pada tahun 1963-1966). Kala itu, Malaysia dan Singapura memiliki kekuatan pertahanan udara yang lemah dan berhadapan dengan Indonesia yang memiliki kekuatan militer terkuat di kawasan Asia Tenggara. Sementara Indonesia memiliki hubungan politik yang sangat baik dengan Uni Soviet. Indonesia mampu mengimpor berbagai alat utama sistem senjata (alutsista) unggulan, seperti pesawat pembom strategis Tu-16 Badger yang dilengkapi dengan *stand-off anti-ship missile* AS-1 Kennel, kapal perang penjelajah kelas KRI Irian, kapal selam kelas Whisky, rudal anti pesawat jarak menengah SA-2, dan lain sebagainya. Walau Indonesia, Singapura dan Malaysia sudah tergabung dalam ASEAN sejak tahun 1967, namun kekuatan

¹⁷ Carlyle A. Thayer, "The Five Power Defence Arrangements: The Quiet Achiever", *Security Challenges*, Vol. 3, No.1, February 2007, hlm. 79 - 96.

militer Indonesia yang dominan di Asia Tenggara masih membuat Singapura dan Malaysia merasa perlu mendapat bantuan perimbangan kekuatan eksternal via FPDA, terutama dari aspek bantuan sistem pertahanan udara.

Namun di era rezim Soeharto, Indonesia mengubah politik luar negerinya dengan menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura serta lebih mendekatkan diri ke Blok Barat (Amerika Serikat dan sekutunya).¹⁸ Walau politik Indonesia telah semakin liberal dan demokratis, namun (anehnya) keberadaan FPDA masih dipertahankan.¹⁹ Thayer²⁰ justru berpendapat bahwa sejak didirikan pada tahun 1971, FPDA telah berevolusi dari kerja sama pertahanan udara di Semenanjung Malaysia dan Singapura menjadi aliansi pertahanan. Pada awalnya, FPDA bukanlah aliansi, melainkan hanya forum konsultatif. Namun saat ini, FPDA telah menjadi aliansi pertahanan yang tidak kentara (*unobtrusive alliance*). Dalam terminologi militer konvensional, FPDA berperan sebagai penangkal psikologis untuk semua penyerang (tidak terkecuali juga Indonesia), walau potensi perang rendah. Penyerangan terhadap Malaysia atau Singapura akan direspons oleh Australia, Selandia Baru dan Inggris, sesuai kesepakatan dalam FPDA. Sementara jika Australia, Selandia Baru dan Inggris terlibat perang, maka Amerika Serikat juga berpotensi untuk terlibat perang. Hal ini karena Amerika Serikat memiliki traktat aliansi dengan Inggris, Australia dan Selandia Baru yang harus ditegakkan.

Dalam komunike pendirian FPDA (16 April 1971) telah disepakati bahwa²¹: "terkait

¹⁸ Situs Resmi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. 2015. Politik Luar Negeri Indonesia dari Masa ke Masa yang disadur dari Sumber Harian Kompas yang terbit pada tanggal 15 Januari 2014, <http://www.otda.kemendagri.go.id/index.php/berita-210/1434-politik-luar-negeri-indonesia-dari-masa-ke-masa> pada tanggal 22 November 2015. Hal senada juga terbit di Harian Kompas pada tanggal 15 Januari 2015 dengan judul *Blok Timur Pernah Bikin Indonesia Disegani* (<http://nasional.kompas.com/read/2010/11/18/03341689/twitter.com>, 14 Oktober 2015).

¹⁹ Kebijakan Konfrontasi yang sudah ditinggalkan rezim Soeharto di era Orba serta adanya ASEAN, tidak serta merta membuat FPDA dibubarkan.

²⁰ Carlyle A. Thayer, *op.cit.*, hlm. 79-96.

²¹ *Ibid.*, hlm. 1. Disebutkan bahwa dalam naskah komunike pendirian FPDA tercantum: "*in relation to the external defense*

pertahanan eksternal Malaysia dan Singapura, manakala terjadi serangan bersenjata terorganisir atau terdukung, atau ancaman serangan tersebut terhadap Malaysia atau Singapura, pemerintah negara tersebut akan segera mengkonsultasikan bersama, tujuan dari keputusan yang seharusnya diambil atau sebagian diambil sehubungan dengan serangan atau ancaman tersebut.” Komunikasi ini menunjukkan suatu komitmen Inggris, Australia dan Selandia Baru dalam mendukung Malaysia dan Singapura, jika kedua negara menghadapi ancaman serius. Hingga saat ini, intensitas dan ekstensitas latihan militer kelima anggota FPDA sudah berkembang ke berbagai simulasi pertempuran. Markas tetap FPDA dengan pos komandonya masih ditetapkan di Butterworth, Malaysia dengan perwira tinggi dari Australia yang selalu menjadi komandannya. Kekuatan militer FPDA sudah dibangun sedemikian rupa untuk mampu melakukan misi koalisi secara cepat dan responsif.

Keberadaan FPDA tentunya sudah tidak relevan lagi jika Malaysia dan Singapura tidak menganggap Indonesia sebagai ancaman. Dengan adanya *ASEAN Political and Security Community* (APSC), seluruh negara ASEAN telah sepakat untuk membentuk suatu pakta pertahanan bersama. Dalam hal ini, isu konflik antar negara anggota ASEAN harusnya sudah hilang dan pakta pertahanan di luar APSC bagi negara-negara anggota ASEAN harusnya sudah ditinggalkan (termasuk tentunya FPDA).

Namun FPDA justru semakin kuat hingga saat ini. Kalau FPDA memang bukan ditujukan untuk mengimbangi Indonesia (sebagai salah satu ancaman), sudah seharusnya FPDA juga harus dapat menerima Indonesia sebagai negara anggotanya. Namun hal tersebut sepertinya tidak mungkin terjadi. Brunei Darussalam yang juga negara persemakmuran Inggris pun belum dapat diterima dalam keanggotaan FPDA.

of Malaysia and Singapore, that in the event of any form of armed attack externally organized or supported, or the threat of such attack against Malaysia or Singapore, their governments would immediately consult together for the purpose of deciding what measures should be taken or separately in relation to such an attack or threat”.

Persoalan yang Dihadapi Indonesia

Menghadapi perilaku agresif Malaysia di perairan sengketa Ambalat, Indonesia selalu mengedepankan jalur diplomasi damai (*softpower*), demi memelihara perdamaian di kawasan.²² Sementara kekuatan angkatan laut tetap melakukan tugas pokoknya mengamankan wilayah sengketa dari pelanggaran kapal asing. Tanpa didukung kekuatan militer yang kuat (*hardpower*), upaya diplomasi tidak akan efektif. Hal ini karena postur militer Indonesia saat ini (dan 20 tahun ke depan) yang kurang memiliki daya tangkal terhadap Malaysia dan kekuatan FPDA, kurang mampu menyumbangkan ‘tekanan’ untuk mendukung diplomasi atas konflik di Ambalat.

Ketidakmampuan Indonesia menang perang dengan Malaysia di front Ambalat bukan dikarenakan kekuatan militer Indonesia lebih lemah dari Malaysia. Melainkan karena superioritas kekuatan relatif Malaysia dalam aliansi FPDA terhadap kekuatan Indonesia. Terlebih lagi Inggris, Australia dan Selandia Baru merupakan sekutu Amerika Serikat. Jika FPDA terlibat konflik, bukan tidak mungkin akan melibatkan Amerika Serikat. Sebagian analis merasa Amerika Serikat tidak akan mau terlibat konflik dengan Indonesia, untuk menjaga kepentingannya terhadap Indonesia. Namun yang perlu dipahami adalah bisa saja terjadi mispersepsi yang dapat menyulut konflik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Munculnya kebijakan Poros Maritim Dunia di tahun 2014, dapat dianggap AS sebagai bentuk kebijakan Indonesia yang mengakomodir kebijakan Jalan Sutra Maritim Abad ke-21 Tiongkok. Persepsi demikian dapat membuat AS memandang Indonesia sebagai ancaman atau bagian dari ancaman atas kepentingan nasionalnya.

Terkait dengan geostrategi di Blok Laut Ambalat, media geografisnya adalah laut. Tidak ada pulau yang diperebutkan di BLA, sehingga tidak mungkin diterapkan perang berlarut (*war of attrition*) di laut. Padahal perang berlarut adalah kunci kemenangan Vietnam Utara dalam melawan AS dalam Perang Vietnam. Tidak ada

²² “Sengketa Ambalat, SBY Pilih Upaya Diplomasi”, *Majalah Online Tempo.com*, 1 Juni 2009, <http://www.tempo.co/read/news/2009/06/01/063179075/Sengketa-Ambalat-SBY-Pilih-Upaya-Diplomasi>, diakses pada tanggal 29 April 2015.

pihak manapun yang tertarik untuk berperang dalam kondisi perang berlarut yang memakan korban dan waktu yang lama.

Jika terjadi perang di front Ambalat, yang terjadi adalah perang yang hanya melibatkan (dan mengandalkan) alutsista matra udara dan laut. Padahal alutsista matra udara dan laut Indonesia secara relatif inferior jika dibandingkan dengan alutsista gabungan kekuatan FPDA dan Amerika Serikat (bahkan dengan kekuatan militer Singapura sekalipun). Berikut ini perbandingan jumlah pesawat tempur, pesawat *airborne early warning and control* (AEW&C), kapal perang sekelas fregat, serta kapal selam antara Indonesia dan 5 (negara) anggota FPDA ditambah Amerika Serikat (AS) :

Masalah nyata atas ketidakseimbangan kekuatan di atas perlu disikapi oleh pemerintah Indonesia secara bijak. Perlu adanya masukan berupa perspektif teoritis versi akademisi untuk dapat dibandingkan dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah (yang dilandasi perspektif praktis). Berikut ini akan disajikan kajian dari kedua perspektif dalam menyikapi sengketa Ambalat.

Tabel 1. Perbandingan Kekuatan Tempur Udara dan Laut Indonesia, FPDA, dan AS

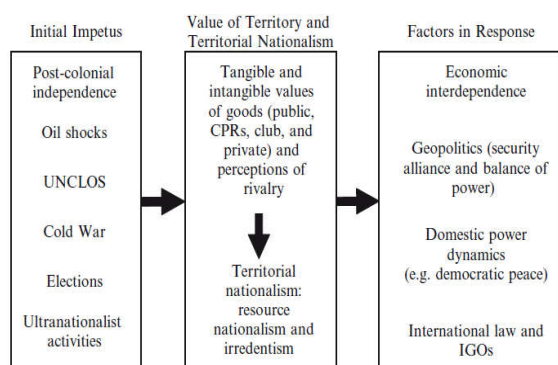
Negara	Alutsista	Jumlah	Keterangan
Indonesia	Pesawat Tempur	20+24	Terdiri dari Su-27 SKM, Su-30MK2, F-16A/B/C/D (24 adalah pesawat F-16 52ID yang baru mendukung kekuatan TNI AU
	Pesawat AEW&C	-	Belum memiliki (baru ada pesawat patroli maritim)
	Kapal jenis Fregat	11	Kelas Ahmad Yani (7) dan Diponegoro (4)
	Kapal Selam	2+3	Kelas Nanggala yang akan ditambah 3 kelas Chang Bogo
Malaysia	Pesawat Tempur	26	Terdiri dari Su-30MKM dan F-18D Hornet
	Pesawat AEW&C	-	Belum memiliki
	Kapal jenis Fregat	10	Kelas Lekiu (2), Kasturi (2), dan Kedah (6)
	Kapal Selam	2	Kelas Scorpene
Singapura	Pesawat Tempur	84	Terdiri dari F-15SG, F-16 C/D dan akan ditambah F-35A
	Pesawat AEW&C	4	Gulfstream G550-AEW dengan sistem intai dari Israel
	Kapal jenis Fregat	6	Kelas Formidable
	Kapal Selam	5	Terdiri dari kelas Challenger (4) dan Archer (1)
Australia	Pesawat Tempur	95	Terdiri dari F-18A/B/F dan akan ditambah F-35A
	Pesawat AEW&C	6	Boeing B-737 Wedgetail
	Kapal jenis Fregat	12	Kelas Adelaide (4) dan Anzac (8)
	Kapal Selam	6	Kelas Collins
Inggris	Pesawat Tempur	230	Terdiri dari Typhoon, Tornado dan akan ditambah F-35C
	Pesawat AEW&C	6	E-3D Sentry
	Kapal jenis Fregat	13	Kelas Norfolk; belum termasuk kapal induk, <i>cruiser</i> , dan 5 (lima) <i>destroyer</i>
	Kapal Selam	11	Terdiri dari kelas Vanguard (4), Trafalgar (5), Astute (1)
Selandia Baru	Pesawat Tempur	-	Belum ada
	Pesawat AEW&C	-	Belum ada
	Kapal jenis Fregat	2	Kelas Anzac
	Kapal Selam	-	Belum ada
Amerika Serikat	Pesawat Tempur	2365	Terdiri dari F-22A, F-35A/B/C, F-15C/D/E, F-18C/D/E/F, F-16 C/D, belum termasuk B-52, B-2, UCAV, dan lain sebagainya
	Pesawat AEW&C	98	Terdiri dari E-2C/D, E-3B/C
	Kapal jenis Fregat	17	Kelas Freedom, Independence, dan Oliver Hazard Perry; belum termasuk 11 kapal induk, 22 <i>cruiser</i> , 62 <i>destroyer</i>
	Kapal Selam	72	Terdiri dari kapal selam nuklir kelas Ohio (18), Los Angeles (42), Virginia (9) dan Seawolf (3); belum termasuk kapal selam diesel

Sumber : Diolah penulis dari informasi yang berasal dari The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2013*, (London: Routledge, 2013).

Perspektif Teoritis

Konsep sengketa perbatasan dalam level teoritis adalah perebutan hak atas wilayah teritori yang saling tumpang tindih antara dua atau lebih negara. Sengketa ini umumnya ditampilkan di arena politik internasional. Sengketa muncul mana kala ada negara yang menghendaki perubahan wilayah dari yang ada dalam *status quo*.²³ Gyo Koo berpendapat bahwa penyebab dari perubahan wilayah tersebut dapat disebabkan oleh munculnya kemerdekaan post-kolonial, harga minyak yang meroket, efek dari UNCLOS, perang dingin, pemilihan umum, dan aktivitas ultranasionalis.²⁴ Sementara nilai ekonomis dari wilayah yang disengketakan serta bangkitnya semangat nasionalisme di daerah sengketa juga dapat meningkatkan eskalasi konflik. Respons terhadap sengketa tersebut pada akhirnya akan tergantung pada ketergantungan ekonomi dari pihak-pihak yang bersengketa, kondisi geopolitik (termasuk didalamnya adanya aliansi dan perimbangan kekuatan), dinamika kekuatan domestik, dan rejim hukum internasional (lihat diagram di bawah ini).

Tabel 2. Diagram Inisiasi Sengketa



Sumber: Min Gyo Koo, *Island Disputes and Maritime Regime Building in East Asia: Between a Rock and a Hard Place*, (London: Springer, 2010), hlm. 22.

²³ Min Gyo Koo, *Island Disputes and Maritime Regime Building in East Asia: Between a Rock and a Hard Place*, (London: Springer, 2010), hlm. 21.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

Setelah sengketa terinisiasi, maka jika pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai, maka sengketa akan masuk ke babak negosiasi. Namun jika satu pihak menekan pihak yang lain dengan keras dan pihak yang lain merespons dengan kekuatan militer, maka sengketa akan tereskalasi menjadi konflik bersenjata. Tekanan satu pihak ke pihak yang lain merupakan bagian dari negosiasi. Bahkan perang sekalipun menurut Clausewitz merupakan penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik.²⁵ Sehingga daya tangkal yang dimiliki kekuatan militer suatu negara yang bersengketa, tentu memiliki pengaruh dalam proses dan negosiasi sengketa itu sendiri. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan cara damai, cenderung akan mengarah pada konflik bersenjata. Pada situasi konflik bersenjata tersebut, maka yang menentukan adalah kekuatan militer masing-masing negara sengketa dan kekuatan militer eksternal dari negara yang beraliansi dengan negara yang bersengketa.

Masalahnya, kekuatan militer negara-negara yang bersengketa selalu berada dalam ketidakseimbangan. Terlebih lagi jika ditambahkan faktor kekuatan eksternal dari aliansi negara yang bersengketa. Stephen Walt²⁶ dengan teori *Balance of Threat* (BOT)-nya berpendapat bahwa ketika terjadi ketidakseimbangan ancaman/*imbalanced threat* (dari negara atau koalisi negara lain), maka suatu negara akan membangun aliansi atau meningkatkan kemampuan internal untuk mengurangi kerentanannya (*vulnerability*). Gabungan kekuatan eksternal dalam aliansi akan mengatasi kelemahan negara tersebut dalam menghadapi ancaman dari negara atau koalisi negara lain.

Dalam konteks aliansi, Benson, Bentley dan Ray dari Universitas Vanderbilt²⁷ berpendapat ada dua jenis aliansi, yaitu: *conditional deterrent alliance* dan *unconditional deterrent alliance*. Pada *conditional alliance*, dukungan negara anggota aliansi terhadap negara anggota lain

²⁵ Carl von Clausewitz, *On War*, (London: Wordsworth, 1997), hlm. 13, 263-265.

²⁶ Stephen Walt, *The Origin of Alliances*, (Ithaca: Cornell University Press, 1987), hlm. 5.

²⁷ B.V. Benson, P.R. Bentley, J.L. Ray, *op.cit.*, hlm. 47-58.

tidaklah mutlak. Ada alasan bagi anggota aliansi untuk menolak membantu negara anggota lain yang sedang menghadapi ancaman eksternal. Sedang pada *unconditional deterrent alliance*, negara anggota akan selalu mendapat dukungan militer dari negara anggota aliansi lainnya saat terlibat konflik dengan negara lain (tidak peduli penyebab konflik tersebut adalah sesuatu yang bersifat *unjust* atau secara moral salah). Sementara Snyder²⁸ berpendapat bahwa ikatan aliansi yang bersifat *unconditional* dapat membuat hambatan atas peningkatan eskalasi konflik semakin rendah. Hal ini dikarenakan ancaman dari negara lain harus dianggap sebagai ancaman bagi seluruh negara anggota aliansi (yang harus dihadapi bersama). Karena jika tidak segera dilakukan tindakan, kredibilitas aliansi sebagai *psychological deterrent* (kepada potensi lawan) menjadi tidak efektif. Zagare dan Kilgour²⁹ (yang juga didukung pendapat Jervis)³⁰ berpendapat bahwa strategi deterren yang efektif adalah yang mampu menunjukkan kekuatan (*capability*) dan kemauan (*willingness*)-nya untuk berperang. Sedangkan menurut Montratama,³¹ jika musuh mempersepsikan kekuatan suatu negara lemah, walaupun kekuatan negara itu kuat, maka musuh tidak segan untuk berkonflik. Demikian juga jika musuh mempersepsikan kemauan suatu negara untuk berperang lemah, walaupun kekuatan negara itu kuat, maka musuh juga tidak segan untuk berkonflik. Sehingga strategi harus dibangun dengan menyiapkan kekuatan yang *decisive* (menentukan), disertai dengan penyiapan kemampuan menggunakan kekuatan tersebut, penggelaran kekuatan (*military forces deployment*) dan komunikasi yang efektif pada potensi lawan, bahwa negara tersebut memiliki kemampuan dan kemauan untuk menggunakan kekuatannya jika diperlukan.

²⁸ Glenn H. Snyder, *Alliance Politics*, (Ithaca: Cornell University Press, 1997), hlm. 61

²⁹ F.C. Zagare & D.M. Kilgour, *Perfect Deterrence*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 289.

³⁰ Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics*, (Princeton: Princeton University Press, 1976), hlm. 90-91.

³¹ Ian Montratama, *Analisis "Deterrence Perception" atas Kemampuan Alat Utama Sistem Senjata Malaysia Dihadapkan dengan Indonesia Dalam Konteks Pengendalian Blok Laut Ambalat (2010-2014)*, Tesis, (Jakarta: Unhan, 2014), hlm. 19.

Dari pendapat akademisi realis di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan aliansi akan membuat suatu negara memiliki kekuatan relatif yang besar. Kekuatan relatif itu dapat diproyeksikan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya, walaupun dalam wujud perilaku yang agresif. Sehingga kunci untuk melemahkan aliansi berada pada perimbangan kekuatan (*balancing*). Namun bagi negara yang kekuatan internalnya inferior, perimbangan kekuatan harus dibangun dari kekuatan eksternal. Penambahan kekuatan dari luar inilah yang merupakan esensi dari aliansi.

Sementara Walt³² berpendapat bahwa aliansi dapat melemah, yang disebabkan oleh tiga alasan, yaitu: (1) perubahan persepsi atas ancaman. Aliansi dibangun untuk merespons suatu ancaman yang dipersepsikan bersama oleh sekelompok negara dalam aliansi. Manakala persepsi (dari satu atau lebih negara anggota aliansi) atas ancaman tersebut berubah, maka keberadaan aliansi menjadi tidak relevan lagi. Tidak ada lagi musuh yang dijadikan alasan pembentukan aliansi (setidaknya bagi satu atau lebih negara anggota aliansi). Sehingga aliansi dapat saja bubar sama sekali atau terbentuk aliansi baru yang terdiri dari negara-negara yang masih menganggap adanya musuh bersama; (2) menurunnya kredibilitas aliansi. Aliansi juga dibangun untuk menjadi *psychological deterrent* bagi potensi musuh. Namun jika aliansi sama sekali tidak memberi ancaman signifikan bagi potensi musuh, maka eksistensi aliansi tersebut juga menjadi tidak relevan lagi. Atau jika satu atau lebih negara anggota terlibat konflik dengan musuh bersama, namun negara-negara anggota aliansi lainnya memilih untuk tidak terlibat dalam konflik tersebut, maka kredibilitas aliansi akan runtuh; (3) perubahan politik domestik negara anggota aliansi. Perilaku suatu negara juga sangat dipengaruhi oleh elit birokrasi di negara tersebut. Manakala terjadi perubahan rezim kekuasaan politik di satu negara anggota aliansi dan rezim yang baru memiliki persepsi ancaman yang sama sekali berbeda atas negara lain (yang selama ini dianggap sebagai negara potensi lawan), maka eksistensi aliansi juga menjadi tidak relevan

³² S.M. Walt, "Why Alliance Endure or Collapse", *Survival*, Vol. 39. No. 1, Spring 1997, hlm. 156-179.

lagi. Rezim baru tersebut dapat saja memutuskan untuk menarik keanggotaan negaranya dari aliansi tersebut.

Perspektif Praktis

Dalam perspektif praktis, sengketa Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia merupakan sengketa yang terutama disebabkan oleh faktor sumber daya alam, terutama minyak bumi dan gas alam yang terkandung di bawah dasar laut perairan Ambalat. Kedua pemerintahan telah menginisiasi babak negosiasi, namun sejak tahun 2005, aparat Malaysia telah mulai melakukan sejumlah tindakan pelanggaran batas secara provokatif.

Perilaku provokatif Malaysia ini dapat merupakan suatu tanda bahwa Malaysia memiliki persepsi bahwa akumulasi kekuatan internal dan eksternal (yang didapat dari aliansi FPDA) telah membuat situasi ketidakseimbangan ancaman (*balance of threat*) antara kedua kekuatan. Indonesia berada pada posisi yang inferior yang kekuatannya kurang memiliki daya tangkal. Situasi ketidakseimbangan ancaman ini yang harus ditanggapi dari level praktis. Pemerintah Indonesia harus mengimbangi hal tersebut dengan cara meningkatkan kekuatan internal dan menambah kekuatan dari luar, dalam bentuk aliansi.

Namun aliansi dalam tataran kebijakan formal di Indonesia sepertinya dianggap sesuatu yang tabu. Pemerintah Indonesia sangat menjunjung politik bebas aktif. Drs. Mohammad Hatta³³ dalam pidatonya yang berjudul “*Mendajung di Antara Dua Karang*” pada tahun 1948 di muka sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) mengamanatkan: “*Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia Merdeka seluruhnya.*” Pidato ini

³³ Mohammad Hatta, *Mendajung antara Dua Karang*, naskah pidato Mohammad Hatta di depan Sidang BPKNP pada tanggal 2 September 1948 di Yogyakarta. Naskah pidato dapat dilihat di <https://serbasejarah.files.wordpress.com/2012/05/mendajung-antara-dua-karang.pdf>, diakses pada tanggal 23 Desember 2014.

yang mempengaruhi bentuk politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif.

Sejak zaman Orde Lama, politik bebas aktif terus dipertahankan. Politik bebas aktif diartikan sebagai bebas dari aliansi (tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila).³⁴ Namun sejak era Sukarno hingga sekarang politik bebas aktif Indonesia tidak dijalankan dengan konsisten. Di era Sukarno, Indonesia pernah terlibat dalam poros Jakarta-Peking-Pyongyang-Moskow. Indonesia menerima banyak bantuan dan tawaran persahabatan dari Tiongkok, Korea Utara dan Rusia.³⁵ Di era Reformasi, tepatnya pada bulan November 2010, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat meratifikasi *Comprehensive Partnership Arrangement (CPA)*.³⁶ Khusus untuk bidang pertahanan, kedua negara telah meratifikasi *Framework Arrangement on Cooperative Activities in the Field of Defense* atau *Defense Framework Arrangement (DFA)* pada bulan Juni 2010³⁷ antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (Menhan AS). Keinginan AS untuk bermitra dengan Indonesia tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintahan Obama sejak tahun 2011 untuk lebih memberi perhatian kepada Asia-Pasifik yang dikenal dengan nama kebijakan *Pivot to the Pacific* atau *Rebalancing toward Asia*.³⁸ Kebijakan ini dinilai sebagai respons atas kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan besar di Asia Pasifik. Wujud dari kebijakan ini adalah memprioritaskan kawasan Asia Pasifik dalam

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, (Bandung : Penerbit Alumi, 1983), hlm. 7

³⁵ Ramadhian Fadillah. Mengenang Poros Jakarta-Peking-Moscow yang buat gemetar AS & Barat yang diterbitkan di harian online Merdeka.com, <http://www.merdeka.com/peristiwa/mengenang-poros-jakarta-peking-moscow-yang-buat-gemetar-as-barat.html>, 24 April 2015, diakses pada tanggal 25 September 2015.

³⁶ Hiebert M et al, *A US-Indonesia Partnership for 2020*, (Lanham: Rowman & Littlefield), hlm. 8.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ M.E. Manyin et al. 2012, *Pivot to the Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" Toward Asia*, (Washington D.C.: Congressional Research Service, 28 Maret 2012), hlm. 2.

perencanaan militer AS, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi.

Lima tahun sebelumnya, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan *alignment* dengan Pemerintah Tiongkok melalui kerangka *Strategic Comprehensive Partnership (SCP)*.³⁹ Pernyataan Bersama ditandatangani kedua kepala negara pada tanggal 25 April 2005 dan Rencana Aksi tahun 2010-2015 ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2010. Kemitraan ini meliputi bidang: (1) politik, keamanan dan pertahanan; (2) kerja sama ekonomi dan pembangunan; (3) maritim, penerbangan, ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) kerja sama sosial dan budaya; (5) kerja sama regional dan internasional. Khusus untuk masalah pertahanan, kedua kepala negara (Presiden Yudhoyono dan Presiden Xi Jinping) sepakat untuk melakukan kerja sama pertahanan bilateral dan meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak melalui konsultasi pertahanan dan keamanan dan meningkatkan kerja sama pada bidang latihan militer bersama, keamanan maritim, industri pertahanan, serta keamanan non-tradisional. Dengan melakukan *alignment* (dalam wujud kemitraan strategis) dengan kekuatan besar dunia (Amerika Serikat dan Tiongkok), praktis Indonesia bukan lagi negara *non-aligned*.

Namun yang sangat disayangkan, kemitraan strategis Indonesia dan Amerika Serikat sejak tahun 2010 dan dengan Tiongkok sejak tahun 2005 seakan tidak memiliki nilai berarti jika dikaitkan dengan sengketa Ambalat dengan Malaysia. Pelanggaran wilayah terus terjadi dari 2002 hingga kini. Implementasi peta jalan (*road map*) dari kedua kemitraan tersebut dapat saja tidak sesuai dari yang telah disepakati kedua belah pihak. Masih terdapat tantangan berat dari elemen politik domestik sendiri. Masih banyak pihak di Indonesia yang berpendapat bahwa politik bebas aktif harus diartikan bebas dari segala bentuk *alignment (non alignment policy)* tanpa *reserve*.

Alignment dengan dua negara besar dunia tanpa memberi daya tangkal bagi Indonesia

³⁹ Kemenlu RI, *Direction Of Indonesia - China Comprehensive Strategic Partnership*, 2 Oktober 2013, <http://kemlu.go.id/Documents/RI-RRRT/Joint%20Statement%20Comprehensive%20Strategic%20Partnership.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2015.

tersebut merupakan suatu bentuk kesediaan. Dalam hal ini, kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta Tiongkok, belum mampu memiliki dampak berarti untuk memproyeksikan kekuatan eksternal Indonesia atas Malaysia dengan FPDA-nya. Kedekatan hubungan bilateral RI-Tiongkok dan RI-AS tidak mengalami kemajuan yang signifikan setelah diratifikasinya kedua kemitraan strategis tersebut. Bahkan program peningkatan kemampuan instansi pertahanan yang ditawarkan kepada Indonesia (dan juga kepada negara mitra strategis AS lainnya) dipandang sebagai bentuk intervensi AS terhadap pemerintahan Indonesia. Hal tersebut salah satunya tercermin dari tekanan sejumlah pihak yang mengkritisi usulan program *Minimum Essential Forces (MEF)* versi *Defense Institution Reform Initiative* (instansi pemerintah AS) untuk TNI.⁴⁰ Di satu sisi, Pemerintah AS ingin menunjukkan keseriusannya untuk membantu negara mitranya dalam membangun sistem pertahanan yang lebih baik. Namun di sisi yang lain, pemerintah AS dianggap terlampau mencampuri urusan dalam negeri negara mitranya. Namun terlepas dari mispersepsi tersebut, perlu adanya reinterpretasi dari *alignment* yang dibangun Indonesia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, untuk dimanfaatkan bagi kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam konteks mengamankan *status quo* di perairan Ambalat.

Dalam politik internasional, terdapat sejumlah fenomena di luar kewajaran. Misalnya, AS yang berkompetisi dengan Tiongkok secara politik (bahkan menerapkan strategi *containment*) namun dalam bidang ekonomi merupakan mitra perdagangan utama Tiongkok. Sementara Tiongkok pun menjadi negara pembeli surat hutang pemerintah AS terbesar. Sehingga dalam bidang politik berkompetisi, namun dalam bidang ekonomi saling bergantung.

Di bidang politik dan keamanan, tidak ada alternatif lain untuk kemitraan strategis bagi Indonesia sebaik dengan AS. Tiongkok yang

⁴⁰ Situs resmi Kemenhan RI (Defense Media Center), *Action Plan 2015: Pedoman Kerja sama Peningkatan Sistem dan Manajemen Pertahanan*, 7 Januari 2015, <http://dmc.kemhan.go.id/post-action-plan-2015-pedoman-kerja-sama-peningkatan-sistem-dan-manajemen-pertahanan.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2015.

ekonomi dan kekuatan militernya tengah bangkit, tetap saja kekuatannya masih jauh di bawah kekuatan hegemoni AS. Selain itu, Tiongkok tengah terkepung secara politik oleh kekuatan AS dan pendukungnya, yaitu: Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Filipina, Australia, Selandia Baru, Singapura, Thailand, dan (mungkin) Vietnam. Jika Indonesia memilih bermitra secara politik dan keamanan dengan Tiongkok, maka Indonesia harus berseberangan dengan sembilan negara tersebut di atas (plus dengan AS).

Pembentukan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat membutuhkan komunikasi strategis yang efektif terhadap elemen masyarakat Indonesia sendiri, terutama kelompok ultranasionalis dan kelompok religius yang resisten terhadap hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat. Kemitraan strategis Indonesia dan AS cenderung telah disikapi sebagian masyarakat secara sentimental. Isu embargo persenjataan dari tahun 1999 hingga 2005 serta dukungan AS terhadap aksi zionis Israel di bumi Palestina telah menjadi stigma yang menghambat kemajuan hubungan bilateral RI-AS. Rasionalitas dan sikap pragmatis yang diserukan Bung Hatta masih belum dapat dipahami sebagian masyarakat.

Jika dipelajari pidato Drs. Mohammad Hatta⁴¹ pada tahun 1948 di muka sidang BPKNP, beliau mengamanatkan Indonesia untuk menjadi subjek dan bukan objek dari persaingan politik dunia. Perilaku menjadi subjek pun harus realistis dan bukan sentimental. Artinya *alignment* tidak diharamkan. Seperti yang beliau sebutkan dalam pidatonya, Soviet Rusia pun pada tahun 1939 pernah melakukan *alignment* dengan Nazi Jerman (yang merupakan potensi musuh) karena hendak melakukan konsolidasi kekuatan pertahanannya dahulu. Dengan *alignment* tersebut, Soviet Rusia dapat terhindar untuk sementara waktu (selama 18 bulan) dari konflik dengan Nazi Jerman. Yang pada akhirnya di Perang Dunia ke-2, kedua kekuatan tersebut akhirnya bertempur juga,

⁴¹ Mohammad Hatta, *Mendajung antara Dua Karang*, naskah pidato Mohammad Hatta di depan Sidang BPKNP pada tanggal 2 September 1948 di Yogyakarta. Naskah pidato dapat dilihat di <https://serbasejarah.files.wordpress.com/2012/05/mendajung-antara-dua-karang.pdf>, diakses pada tanggal 23 Desember 2014.

namun dalam kondisi dimana kekuatan Soviet Rusia sudah semakin kuat.⁴²

Dengan modal kemitraan strategis dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia seharusnya mampu memanfaatkannya sedemikian rupa untuk keamanan dan kesejahteraan bangsanya. Dalam situasi yang cenderung masih unipolar saat ini, Indonesia akan mendapat manfaat politik jika dapat memiliki kemitraan strategis dengan hegemon di bidang politik dan militer. Hubungan itu dibangun sedemikian rupa sehingga Indonesia masih memiliki kebebasan dalam menjalin hubungan baik dengan negara besar lain yang bersaing pengaruh dengan Amerika Serikat seperti Tiongkok dan Rusia. Hubungan yang dimaksud adalah seperti apa yang diperankan oleh negara Thailand dan Pakistan. Sebagai negara sekutu AS, Thailand dan Pakistan ternyata telah mampu menjalin kerja sama industri pertahanan yang sangat erat dengan industri pertahanan Tiongkok. Pakistan mengembangkan pesawat tempur generasi 4 bersama Tiongkok (yang dinamakan JF-17 Thunder atau FC-1 Xiaolong). Sementara

⁴² *Ibid.*, petikan pidato terkait: “Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan daripada pergolakan politik internasional. Memang tiap-tiap politik untuk menjapai kedudukan negara yang kuat ialah mempergunakan pertentangan internasional yang ada itu untuk menjapai tujuan nasional sendiri. Belanda berbuat begitu, ja segala bangsa sebenarnya berbuat sematjam itu, apa sebab kita tidak akan melakukannya? Tiap-tiap orang diantara kita tentu ada mempunyai simpati terhadap golongan ini atau golongan itu, akan tetapi perdjooangan bangsa tidak bisa dipetjah dengan menuruti simpati sadja, tetapi hendaknja didasarkan pada realitet, kepada kepentingan negara kita setiap waktu. Sovjet Russia sendiri memberi tjontoh kepada kita, bahwa politik internasional tidak bisa dihadapi dengan sentimen belaka, tetapi dengan realitet dan dengan logika yang rasionil. Dalam tahun 1935, tatkala Sovjet Russia menghadapi arus fascis, ia merobah haluannja yang radikal yang menentang negara-negara demokrasi Barat, dan mengandjurkan kepada kaum komunis di luar Russia untuk memberhentikan serangannja kepada pemerintah-pemerintah kapitalis dan beserta dengan mereka mengadakan suatu volksfront-politik untuk menentang fascis. Malahan kepada bangsa-bangsa yang terdjajah di waktu itu diandjurkan supaya mengurangkan perdjooangannja yang tadjam menentang imperialisme kolonial, melepaskan sementara waktu tjita-tjita kemerdekaan, dan membantu memperkuat voksfrent yang diandjurkan tadi. Dalam tahun 1939 Sovjet Russia mengadakan perdjandjian non-agresi dengan Nazi-Djerman, dan dengan perdjandjian itu Russia selama 18 bulan terpelihara daripada serangan dari Hitler; sementara itu ia dapat memperkuat alat pertahanannja. Timbangan yang rasionil memaksa Sovjet Russia mengadakan perdjandjian dengan musuhnja. Dan apabila politik hanya didasarkan kepada sentimen, yang sedemikian itu tentu tidak mungkin terdjadi.”

Thailand telah mampu memproduksi *Multi-Launchers Rocket Systems* (MLRS) lisensi Tiongkok (dengan nama DTI-1 (lisensi teknologi WS-1B) dan DTI-1G (dengan teknologi WS-32) yang terus dikembangkan lebih lanjut). Fenomena di atas menunjukkan bahwa bagi negara aliansi, masih terdapat peluang kebebasan berhubungan diplomatik dengan rival mitra aliansinya. Untuk dapat seperti itu tentunya dituntut kemampuan dan ketrampilan diplomasi yang sangat tinggi.

Rekomendasi untuk Pemerintah

Kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat merupakan suatu pengimbang aliansi FPDA yang efektif. Hal ini dikarenakan hampir semua negara aliansi FPDA merupakan mitra dekat Amerika Serikat. Inggris, Australia, dan Selandia Baru adalah aliansi AS. Singapura adalah mitra strategis AS. Malaysia pun juga menjadi mitra dekat AS. Jika Indonesia ingin memiliki kekuatan relatif yang lebih baik dari Malaysia, maka Indonesia harus membangun hubungan yang lebih erat dengan AS, dibandingkan hubungan AS dengan Malaysia. Kemitraan strategis yang lebih erat perlu dibangun menyerupai kuasi-aliansi (dimana serangan atas Indonesia merupakan serangan bagi Amerika Serikat, demikian pula sebaliknya). Kuasi aliansi adalah suatu penamaan atas kemitraan strategis yang sangat erat yang menyerupai aliansi.⁴³ Hal ini ditunjukkan oleh kemitraan Singapura dengan Amerika Serikat. Kemitraan kedua negara dinamakan dengan *Strategic Framework Agreement* (SFA) dan Singapura secara formal bukanlah sekutu Amerika Serikat.⁴⁴ Namun perlakuan Amerika Serikat terhadap Singapura menyerupai perlakuan ke sekutunya (dan bahkan lebih baik lagi). Terbukti dengan disetujuinya Singapura membeli pesawat tempur generasi ke-5 (F-35)⁴⁵ dan penempatan 4 (empat)

⁴³ John Garnaut, "Australia-Japan military ties are a 'quasi-alliance', say officials", *The Sydney Morning Herald*, 26 Oktober 2014, <http://www.smh.com.au/national/australiajapan-military-ties-are-a-quasi-alliance-say-officials-20141026-11c4bi.html>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2015.

⁴⁴ Kemenlu AS, *Joint Statement on the Third United States-Singapore Strategic Partnership Dialogue*, 13 Februari 2015, <http://www.state.gov/t/pa/prs/ps/2015/02/237495.htm>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2015.

⁴⁵ Carl A. Thayer, "Why Singapore Wants the F-35", *The*

Littoral Combat Ship (LCS) Angkatan Laut AS di Singapura pada tahun 2018⁴⁶ untuk tujuan *strategic forward defense* kekuatan militer AS di kawasan Asia Tenggara.

Defense Framework Arrangement (DFA) RI-AS merupakan pintu gerbang ke arah terwujudnya *alignment* dan/atau kuasi-aliansi atau aliansi antara Indonesia dan Amerika Serikat yang lebih erat. Amerika Serikat telah memiliki kemitraan strategis dengan 63 negara di luar Indonesia.⁴⁷ Dalam kemitraan strategis, AS tidak hanya memberikan dukungan politis, namun juga berupaya untuk membantu meningkatkan kapasitas pertahanan negara mitranya. Bentuk bantuan itu dapat berupa bantuan program secara hibah, bantuan pelatihan, dan latihan bersama. Selain itu, AS juga memberi akses lebih luas kepada negara mitra strategisnya untuk mengimpor sarana pertahanan dari AS melalui mekanisme *Foreign Military Sales* (FMS) dan *Foreign Military Financing* (FMF). Instansi yang mengelola kemitraan ini adalah *Defense Security Cooperation Agency* (DCSA). Instansi ini juga membantu memberikan kajian untuk membangun institusi pertahanan di negara mitra yang dikenal dengan program *Defense Institution Building* (DIB).⁴⁸ Salah satu sub instansi dibawah DCSA yang melaksanakan program DIB adalah *Defense Institution Reform Initiative* (DIRI).⁴⁹ DIRI melakukan kajian untuk memajukan sistem birokrasi dan perencanaan strategis negara mitra. Kajian ini bersifat tidak diminta (*unsolicited*) dan tanpa paksaan untuk dilaksanakan. Untuk Indonesia, DIRI telah berkunjung secara formal

Diplomat, 24 Maret 2014, <http://thediplomat.com/2014/03/why-singapore-wants-the-f-35/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2015.

⁴⁶ Franz-Stefan Gady, "4 US Littoral Combat Ships to Operate out of Singapore by 2018", *The Diplomat*, 19 Februari 2015, <http://thediplomat.com/2015/02/4-us-littoral-combat-ships-to-operate-out-of-singapore-by-2018/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2015.

⁴⁷ Daniel S. Hamilton, "The American Way of Partnership", *ESPO Working Paper*, No.6, Juni 2014, hlm. 22-23. (lihat lampiran).

⁴⁸ DCSA, *Defense Institution Building*, <http://dsca.mil/programs/institutional-programs>, diakses pada tanggal 1 Mei 2015.

⁴⁹ Inspector General of U.S. Department of Defense, "Defense Institution Reform Initiative Program: Elements Need to Be Defined", Report No. DODIG-2013-019, 9 November 2012.

sebanyak delapan kali ke Indonesia sejak tahun 2010.⁵⁰ Salah satu kajian yang dihasilkan adalah tentang usulan program *Minimum Essential Forces* (MEF) versi DIRI untuk TNI.⁵¹ Kegiatan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah AS untuk membantu negara mitranya dalam membangun sistem pertahanan yang lebih baik.

Keinginan AS untuk bermitra dengan Indonesia tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintahan AS sejak tahun 2011 untuk lebih memberi perhatian kepada Asia-Pasifik yang dikenal dengan nama kebijakan *Pivot to the Pacific* atau *Rebalancing toward Asia*.⁵² Wujud dari kebijakan ini adalah memprioritaskan kawasan Asia Pasifik dalam perencanaan militer AS, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi.⁵³ *Rebalance* dimaksudkan dengan penarikan pasukan AS di Irak dan juga di Afghanistan, serta menambah perhatian ke Asia Pasifik untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan. Pada bulan November 2011, Presiden Obama menyampaikan pidato di depan parlemen Australia bahwa Amerika Serikat akan memainkan peran yang lebih besar dan untuk jangka panjang di Asia Pasifik.⁵⁴ Tujuan utamanya adalah turut membentuk norma dan aturan di Asia Pasifik agar hukum dan norma internasional ditegakkan, *freedom of navigation* tidak terganggu, kekuatan-kekuatan besar membangun kepercayaan dengan negara-negara tetangganya dan persengketaan diselesaikan secara damai tanpa menggunakan kekerasan.

Jika pemerintahan Presiden Joko Widodo mampu memanfaatkan momentum di atas, maka bukanlah tidak mungkin jika Indonesia mampu membangun kemitraan strategis yang seerat hubungan bilateral AS dengan Singapura. Dengan kemitraan yang bersifat kuasi aliansi,

⁵⁰ Kemenhan, 2015, *op.cit.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² M.E. Manyin et al, 2012, *op.cit.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ "Remarks By President Obama to the Australian Parliament", <https://m.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament>, diakses pada tanggal 1 Mei 2015; atau <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament>, 17 November 2011, diakses pada tanggal 22 November 2015.

maka diharapkan daya tangkal Indonesia menjadi semakin besar dan *status quo* di Blok Laut Ambalat diharapkan dapat dipertahankan oleh Indonesia.

Penutup

Kemitraan strategis RI dan AS membuka jalan untuk meningkatkan kekuatan relatif bagi Indonesia yang sekaligus akan menurunkan kekuatan aliansi FPDA. Hal ini akan menyeimbangkan ancaman yang semenjak tahun 1971 lebih menguntungkan pihak Malaysia. Pihak Malaysia pun sejak tahun 2005 hingga saat ini melakukan tindakan provokatif yang jika menggunakan pendapat Benson et.al⁵⁵ dikarenakan Malaysia merasa memiliki kekuatan yang lebih besar di dalam aliansi FPDA dibanding Indonesia. Jika kemitraan strategis RI dan AS dibangun mendekati aliansi (kuasi aliansi), maka diharapkan Malaysia akan merubah perilaku menjadi lebih bersahabat dengan Indonesia.

Pidato Bung Hatta tahun 1948⁵⁶ yang berjudul "Mendayung di Antara Dua Karang" perlu dipahami lebih seksama. Pemahaman penulis, Bung Hatta justru menganjurkan kita untuk mempertimbangkan *alignment* jika diperlukan demi kepentingan negara. Jika belajar dari Thailand dan Pakistan, aliansi dengan AS tidak menutup kemungkinan untuk membangun kemitraan strategis dengan Tiongkok.⁵⁷ Oleh karena itu, kemitraan strategis yang sudah ada dengan AS sudah seharusnya dioptimalkan untuk dapat meningkatkan daya tangkal Indonesia kepada negara potensi ancaman. Kemitraan

⁵⁵ Benson, B.V., Bentley, P.R., Ray, J.L., 2013, *op.cit.* hlm. 1.

⁵⁶ Moh. Hatta, *Mendajung Antara Dua Karang. Pidato Keterangan Pemerintah di muka Sidang B.P.K.N.P Di Jogja*, (Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1948), <https://serbasejarah.files.wordpress.com/2012/05/mendajung-antara-dua-karang.pdf>, diakses pada tanggal 23 Desember 2014.

⁵⁷ Zhou Fangye, "The Development of Sino-Thai Relations: Status, Impetus, and New Strategic Opportunities", http://www.nrct.go.th/th/Portals/0/data/%E0%B8%A0%E0%B8%95/2555/10/1stThai-Chinese_doc/Chinese-Presenters/Zhou%20Fangye%20_English_.pdf, diakses pada tanggal 30 April 2015; yang juga diperkuat dengan artikel dari situs Kemenlu Tiongkok, 2013, "Press Statement for the First China-Thailand Strategic Dialogue", 19 Agustus 2013, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/yzs_663350/gjlb_663354/2787_663568/2789_663572/t1067514.shtml, diakses pada tanggal 22 September 2015.

dengan AS amatlah penting terutama untuk bidang politik dan keamanan. Namun demikian, kemitraan strategis di bidang ekonomi dengan Tiongkok pun tidak mustahil dibangun secara paralel asalkan tidak berbenturan dengan kepentingan AS. Kemitraan dengan Tiongkok amatlah diperlukan bagi Indonesia terutama dalam mendorong investasi Tiongkok dalam pembangunan prasarana transportasi laut dan prasarana transportasi darat (jalan tol dan jalur kereta api) di luar Jawa. Bukanlah suatu kebetulan jika konsep Jalur Sutra Maritim abad ke-21 memiliki kemiripan dengan Poros Maritim Dunia,⁵⁸ dan Indonesia harus dapat memanfaatkan momentum intensi Tiongkok untuk mengembangkan prasarana transportasi laut di jalur sutra maritim yang melewati wilayah perairan Indonesia.

Sementara kemitraan strategis dengan AS dalam *Defense Framework Agreement* (DFA)⁵⁹ harus diupayakan untuk menyerupai kuasi-aliansi, seperti yang terjadi pada kemitraan strategis antara Singapura dan Amerika Serikat. Sudah selayaknya bagi Indonesia yang memiliki kekuatan nasional yang besar memiliki daya tawar yang lebih baik dibandingkan Singapura kepada AS. Perlu suatu kajian yang komprehensif untuk mencapai titik temu dalam mengelola kepentingan AS dan kekuatan besar di Asia Pasifik yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa Indonesia. Kepentingan AS dan negara besar tersebut umumnya adalah untuk mengamankan : (1) rute pelayaran; (2) akses ke pasar; (3) dan akses ke sumber daya di kawasan Asia-Pasifik, dan lokasi geografis Indonesia tepat berada di tengah-tengah Asia-Pasifik yang harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan nasional Indonesia.

⁵⁸ Clint Richards, "Indonesia's South China Sea Options", *South China Sea Monitor* Vol. III, 3Maret 2014, http://www.observerindia.com/cms/export/orfonline/modules/southchina/attachments/marchissue_1393842580014.pdf, diakses pada tanggal 30 April 2015.

⁵⁹ Murray Hiebert, *A U.S.-Indonesia Partnership for 2020: Recommendations for Forging a 21st Century Relationship*, (Washington D.C.: CSIS, 2013), http://csis.org/files/publication/130917_Hiebert_USIndonesiaPartnership_WEB.pdf, diakses pada tanggal 30 April 2015.

Daftar Pustaka

Buku

- Clausewitz, Carl von. 1997. *On War*. London: Wordsworth Editions.
- Hiebert, Murray *et al.* 2013. *A US – Indonesia Partnership for 2020*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Jervis, Robert. 1976. *Perception and Misperception in International Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Koo, Min Gyo. 2010. *Island Disputes and Maritime Regime Building in East Asia: Between a Rock and a Hard Place*. London: Springer.
- Manyin, M.E. *et al.* 2012. *Pivot to the Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" Toward Asia*. Washington D.C.: Congressional Research Service.
- Snyder, Glenn H. 1997. *Alliance Politics*. Ithaca: Cornell University Press.
- Wagner, R. Harrison. 2010. *War and the State: the Theory of International Politics*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Walt, Stephen. 1987. *The Origin of Alliances*. Ithaca: Cornell University Press.
- Zagare, F.C. & D.M. Kilgour. 2004. *Perfect Deterrence*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal

- Benson, B.V., P.R. Bentley, J.L. Ray. 2013. "Ally Provocateur: Why Allies Do Not Always Behave". *Journal of Peace Research*. Vol. 50. No.1.
- Hamilton, Daniel S. 2014. "The American Way of Partnership". *ESPO Working Paper*: No.6.
- Richards, Clint. 2014. "Indonesia's South China Sea Options." *South China Sea Monitor* Vol. III. http://www.observerindia.com/cms/export/orfonline/modules/southchina/attachments/marchissue_1393842580014.pdf.
- Thayer, Carlyle A. 2007. "The Five Power Defence Arrangements: The Quiet Achiever". *Security Challenges* 3(1).
- Walt, Stephen .M. 1997. "Why Alliance Endure or Collapse". *Survival* 39(1).

Laporan dan Makalah

- Inspector General of U.S. Department of Defense. 2012. "Defense Institution Reform Initiative

Program: Elements Need to Be Defined”.
Report No. DODIG-2013-019. 9 November.

Surat Kabar dan Website

- “Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008”. <http://www.kemhan.go.id/kemhan/files/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e3.pdf>.
- DSCA. 2015. *Defense Institution Building*. <http://dsca.mil/programs/institutional-programs>.
- Fadillah, Ramadhian. 2015. “Mengenang Poros Jakarta-Peking-Moscow yang Buat Gemetar AS & Barat”. *Merdeka.com*. 24 April. <http://www.merdeka.com/peristiwa/mengenang-poros-jakarta-peking-moscow-yang-buat-gemetar-as-barat.html>.
- Fangye, Zhou. 2013. *The Development of Sino-Thai Relations: Status, Impetus, and New Strategic Opportunities*. http://www.nrct.go.th/th/Portals/0/data/%E0%B8%A0%E0%B8%95/2555/10/1stThai-Chinese_doc/Chinese-Presenters/Zhou%20Fangye%20_English_.pdf.
- “Press Statement for the First China-Thailand Strategic Dialogue”. 19 Agustus 2013. http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zjg_663340/yzs_663350/gjlb_663354/2787_663568/2789_663572/t1067514.shtml.
- Gady, Franz-Stefan. 2015. “4 US Littoral Combat Ships to Operate out of Singapore by 2018”. *The Diplomat*. 19 Februari. <http://thediplomat.com/2015/02/4-us-littoral-combat-ships-to-operate-out-of-singapore-by-2018/>.
- Garnaut, John. 2014. “Australia-Japan military ties are a ‘quasi-alliance’, say officials”. *The Sydney Morning Herald*. 26 Oktober. <http://www.smh.com.au/national/australiajapan-military-ties-are-a-quasi-alliance-say-officials-20141026-11c4bi.html>.
- Haryono, I.D. 2007. “Perspektif Malaysia tentang Sengketa Ambalat”. <https://indronet.files.wordpress.com/2007/09/ambalat.pdf>.
- Hasjim Djalal. 2008. “Perundingan Blok Ambalat Akan Berjalan Alot.” *Tabloid Diplomasi* Edisi Desember 2008. <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issuue/43-desember-2008/249-perundingan-blok-ambalat-akan-berjalan-alot.html>.
- Hiebert, Murray. September 2013. *A U.S.–Indonesia Partnership for 2020: Recommendations for Forging a 21st Century Relationship*. Washington D.C.: CSIS. http://csis.org/files/publication/130917_Hiebert_USIndonesiaPartnership_WEB.pdf.
- Kemenlu AS. 2015. “Joint Statement on the Third United States-Singapore Strategic Partnership Dialogue.” 13 Februari. <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/02/237495.htm>.
- Kemenlu RI. 2013. “Direction Of Indonesia - China Comprehensive Strategic Partnership.” 2 Oktober. <http://kemlu.go.id/Documents/RI-RRT/Join%20Statement%20Comprehensive%20Strategic%20Partnership.pdf>.
- Kusumadewi, Anggi. 2015. “Sejarah Panjang Kemelut RI-Malaysia di Ambalat”. *CNN Indonesia*. 17 Juli. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-ri-malaysia-di-ambalat/>.
- Hatta, Mohammad. 1948. *Mendajung Antara Dua Karang. Pidato Keterangan Pemerintah di muka Sidang B.P.K.N.P Di Jogja*. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia. <https://serbasejarah.files.wordpress.com/2012/05/mendajung-antara-dua-karang.pdf>.
- Montratama, Ian. 2014. *Analisis “Deterrence Perception” atas Kemampuan Alat Utama Sistem Senjata Malaysia Dihadapkan dengan Indonesia Dalam Konteks Pengendalian Blok Laut Ambalat (2010-2014)*. Tesis. Jakarta: Unhan.
- “Sengketa Ambalat, SBY Pilih Upaya Diplomasi”. *Tempo.com*. 1 Juni 2009. <http://www.tempo.co/read/news/2009/06/01/063179075/Sengketa-Ambalat-SBY-Pilih-Upaya-Diplomasi>.
- “Remarks By President Obama to the Australian Parliament”. <https://m.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament>; <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament>. 17 November 2011.
- Situs resmi Kemenhan RI (*Defense Media Center*). 2015. “Action Plan 2015 Pedoman Kerja sama Peningkatan Sistem dan Manajemen Pertahanan”. 7 Januari. <http://dmc.kemhan.go.id/post-action-plan-2015-pedoman-kerja-sama-peningkatan-sistem-dan-manajemen-pertahanan.html>.
- Thayer, Carl. A. 2014. “Why Singapore Wants the F-35”. *The Diplomat*. 24 Maret. <http://thediplomat.com/2014/03/why-singapore-wants-the-f-35/>.